2020
ANNUAL REPORT

A Year of Accomplishments.



PERKUMPULAN IDE DAN ANALITIKA
INDONESIA

(0274) 488427 | www.perkumpulanidea.or.id | Jl. Tunjung No 10 Yogyakarta

Daftar Isi

i PENGANTAR
- Visi Misii
- Citra Diri
- Isu Strategis
- Struktur Lembaga
- Wilayah Kerja

1 BAGIAN 1
PANDEMI COVID 19 DAN UPAYA PEMENUHAN HAK KELOMPOK RENTAN

3 BAGIAN 2
MELEMBAGAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA

6 BAGIAN 3
PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMANFATAAN SATU DATA KEMISKINAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

11 BAGIAN 4
KETERBUKAAN KONTRAK UNTUK TATA KELOLA AIR BERSIH

15 BAGIAN 5
RESPON PANDEMI COVID 19, PEMANTAUAN TATA KELOLA ANGGARAN PENANGANAN COVID 19

21 BAGIAN 6
AUDIT SOSIAL UNTUK PENGAWASAN PEMBANGUNAN

24 BAGIAN 7
PERBAIKAN TATA KELOLA PENGURANGAN RESIKO BENCANA

30 BAGIAN 8
PENGEMBANGAN ISU DAN JARINGAN

32 BAGIAN 9
MEMPERKUAT KAPASITAS INTERNAL UNTUK MOBILISASI SUMBERDAYA

40 BAGIAN 10
MEMPERKUAT KAPASITAS INTERNAL UNTUK MOBILISASI SUMBERDAYA

41 PENUTUP

PENGANTAR

IDEA didirikan pada 20 Mei 1995 dengan Akta Notaris Winahyu Erwiningsih SH, M.Hum Nomor 25 Tanggal 22 April 2004, dan diperbarui dengan Akta Notaris Athanasia Dhian Santi, SH, M.Kn Nomor 02 Tahun 2020. Akta tersebut telah diverifikasi dan diresmikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Kemenkumham Nomor No. AHU-0000463.AH.01.08.Tahun 2020. Analitika Indonesia juga telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) 0220103611224. Sesuai mandatnya, Perkumpulan IDEA didirikan sebagai bagian upaya mendorong pelembagaan mekanisme politik dan kebijakan publik yang menghormati HAM, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya.

IDEA sebagai organisasi non-pemerintah memutuskan untuk menjadi bagian dalam proses transformasi sosial di Indonesia. Satu dekade terakhir ini, perubahan dramatis terjadi dalam tata pemerintahan di Indonesia sehingga menjadi lebih terbuka dan demokratis. Namun perubahan ini belum tentu menjamin akses kelompok-kelompok rentan terhadap sumber daya, karena pada saat yang sama, tarik-menarik kekuatan yang bekerja pada kebijakan publik di Indonesia tidak searah dengan kepentingan kelompok rentan.

IDEA memfokuskan energinya pada pendidikan populer dan advokasi kebijakan anggaran di tingkat pusat serta daerah. Kebijakan anggaran adalah kebijakan yang mengatur alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber daya publik. Dengan demikian maka kebijakan anggaran sangat strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan milenium, kesetaraan & keadilan gender, pengurangan risiko bencana atau pun untuk pemenuhan hak-hak dasar warga.

Kebijakan anggaran pada akhirnya menjadi kebijakan politik karena banyaknya pihak yang berkepentingan atas ketersediaan sumber daya publik yang terbatas. Untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi kelompok rentan, maka dibutuhkan sistem kebijakan anggaran yang deliberatif. Dorongan untuk mewujudkan kebijakan ini membutuhkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat sipil dalam kebijakan publik.

IDEA telah berperan dalam berbagai proses transformasi sosial selama kurun waktu 25 tahun organisasi ini didirikan. Peran-peran tersebut adalah mendorong gerakan anti korupsi di Indonesia, menerbitkan berbagai penelitian dan buku tentang sistem penganggaran di Indonesia. IDEA terlibat dalam berbagai jejaring koalisi CSO dalam gerakan anti korupsi, gerakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, gerakan mendorong keterbukaan informasi publik, Open Government Partnership dan tata kelola industri ekstraktif dan sumber daya alam di Indonesia.

TENTI NOVARI KURNIAWATI
Direktur Eksekutif IDEA

VISI

Terwujudnya kedaulatan rakyat di ranah publik yang ditandai oleh pemenuhan hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat.

MISI

Mendorong proses-proses politik yang demokratis untuk pemenuhan hak-hak dasar warga melalui perubahan kebijakan, penguatan basis dan peningkatan kesadaran publik.

CITRA DIRI

Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia (IDEA) adalah organisasi yang bergerak dalam hal riset, advokasi, konsultansi, peningkatan kapasitas dan pengorganisasian basis dengan keberpihakan ditujukan kepada kelompok rentan yang terhalang aksesnya terhadap pelayanan hak-hak dasar. Sumber pendanaannya berasal dari iuran anggota, hibah pegiat, pengelolaan IRC (Ide dan Analitika Indonesia Resource Center) dan dukungan pihak lain yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip organisasi, dengan wilayah kerja mencakup lokal (Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi) Nasional dan global.



ISU STRATEGIS

- Mendorong tata kelola pembangunan yang inklusif, transparan dan akuntabel yang mencakup pada pengelolaan anggaran di tingkat desa, Kab/Kota, Provinsi serta Nasional dan global.
- Mendorong pengarusutamaan hak warga yang tereksklusi (kelompok rentan, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, warga miskin, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya tanpa mengeksklusi aktor yang lain.
- Meningkatkan pengelolaan pengetahuan sebagai penyedia informasi dan produk pengetahuan untuk pengembangan program dan advokasi yang lebih tua dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
- Mewujudkan lembaga yang memiliki tata kelola organisasi masyarakat sipil yang baik.

DEWAN KONSTITUANTE



RIDAYA LAODENGKOWE
ANGGOTA



WASINGATU ZAKIYAH
KETUA



DENY P SAMBODO
ANGGOTA

DEWAN PENGAWAS



TIEM FARIKAH USMAN
KETUA



WAHYU W BASJIR
ANGGOTA

PENGURUS



DEDY HERIYANTO
ANGGOTA



TENTI NOVARI K
KETUA



YITRA AMBAR R
ANGGOTA

WILAYAH KERJA IDEA
TAHUN 2020



Kab. Kulon Progo
- Desa Gerbosari
- Desa Sendangsari

Kab. Bantul
- Desa Bangunjiwo
- Desa Bawuran

Kab. Sleman
- Desa Condongcatur
- Desa Wedomartani
- Desa Wukirsari
- Desa Sardonoharjo

BAGIAN 01

PANDEMI COVID 19 DAN UPAYA PEMENUHAN HAK KELOMPOK RENTAN

Pandemi Covid 19 pada Tahun 2020 membawa dampak perubahan kebijakan program dan anggaran di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk pencegahan, pemulihan dan penanganan Covid 19. Perubahan tersebut juga mempengaruhi program-program untuk penanggulangan kemiskinan yang sudah direncanakan dalam program reguler. Anggaran pemerintah juga mayoritas dipergunakan untuk program pemulihan ekonomi nasional dan jaring pengaman sosial, terutama dalam sektor kesehatan dan ekonomi akibat dampak pandemi.

Atas dasar kondisi tersebut, IDEA mengubah beberapa strategi program dengan merespon cepat situasi pandemi Covid 19 dengan melakukan monitoring realokasi dan refocusing APBN dan APBD. IDEA juga terlibat dalam mendorong transparansi anggaran refocusing pencegahan dan pemulihan pandemi Covid 19 serta pengawasan penyaluran program Jaring Pengaman Sosial di DIY serta bergabung dalam Forum PRB DIY untuk bidang komunikasi, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dalam masa tanggap darurat IDEA menyediakan 250 masker untuk warga terdampak serta distribusi bantuan pangan kepada 4 desa yang menjadi lokasi program pemberdayaan IDEA. IDEA juga menerima bantuan masker dari OXFAM sejumlah 1900 masker dan sudah didistribusikan ke berbagai lokasi komunitas mitra IDEA. IDEA juga melakukan perubahan strategi program dengan merealokasi beberapa kegiatan untuk pemulihan ekonomi warga.

IDEA berkontribusi dalam melakukan pemantauan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid 19 dengan membuka posko aduan dan bekerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia untuk tindak lanjut aduan. Proses pengadaan barang dan jasa dalam situasi COvid 19 juga menjadi bagian dalam pemantauan yang dilakukan IDEA, mengingat aspek tata kelola program dan anggaran covid 19 sangat penting untuk diawasi agar efektif, efisien dan tepat sasaran bagi warga terdampak.

Rangkaian aaktivitas audit sosial juga dilakukan selama tahun 2020 selain monitoring bansos Covid 19.

Sumberdaya yang dimiliki IDEA secara konsisten diupayakan untuk penguatan organisasi basis dan kelompok rentan, memastikan pemenuhan hak kelompok gender minoritas, penguatan tata kelola data dan tata kelola pemerintahan dengan memperkuat gerakan pengarusutamaan gender dalam konteks UU Desa.

IDEA sepanjang Tahun 2020, juga mengupayakan program keadilan dan kesetaraan gender dengan meningkatkan kapasitas kelompok perempuan dan CSO lokal untuk advokasi anggaran dan monitoring pembangunan di Kota Semarang dan Kabupaten Bojonegoro. Dalam konteks memastikan pelaksanaan pengarusutamaan gender di desa, IDEA bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak memfasilitasi penyusunan panduan penyusunan rencana aksi daerah PUG di tingkat kalurahan dan menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat kalurahan.

IDEA juga masih konsisten dengan memperkuat satu data kemiskinan yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan masih konsisten dilakukan di DIY. Selain memperkuat satu data kemiskinan dan

open data kemiskinan di tingkat pemerintah daerah, IDEA juga memperkuat satu data kemiskinan di tingkat pemerintah desa dengan memberikan rangkaian peningkatan kapasitas dan asistensi teknis serta asistensi kepada warga.

Dari berbagai rangkaian intervensi program tersebut selama tiga tahun berjalan, masih ada catatan-catatan kritis atas upaya pemenuhan hak dasar warga yang sudah dilakukan pemerintah, yaitu:

1. Partisipasi warga dalam proses pembangunan meningkat namun monitoring dan pengawasan melemah.
2. Pemanfaatan data kemiskinan untuk perbaikan proses perencanaan penganggaran tidak maksimal karena bertambahnya jumlah warga miskin di era pandemi.
3. Ruang gerak CSO terbatas dalam melakukan monitoring dan pengawasan serta keterlibatan dalam aktif dalam proses perencanaan penganggaran karena situasi pandemi. Pemerintah cenderung tertutup dan terbatas dalam membuka ruang partisipasi CSO.
4. Proses refocusing dan realokasi anggaran Covid 19 oleh pemerintah kurang transparan dan partisipatif dan kurang melibatkan CSO.

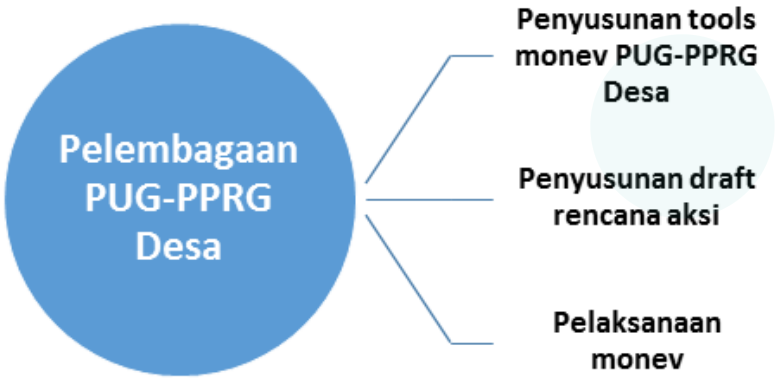
BAGIAN 02

Melembagakan Pengarusutamaan Gender dalam Implementasi Undang-Undang Desa

A. Pelembagaan Desa Responsif Gender

Langkah-langkah memperkuat dan memastikan pengarusutamaan gender dalam implementasi UU Desa selain penguatan kapasitas dan pengorganisasian di tingkat komunitas, juga dilakukan dengan menguatkan kelembagaan yang ada di desa. IDEA bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengimplementasikan program pelembagaan PUG-PPRG (Pengarusutamaan Gender-Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) di desa. Program dilaksanakan dilaksanakan dengan skema melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPRG di 144 desa di Kabupaten Gunungkidul serta membuat panduan penyusunan Rencana Aksi Kalurahan tentang PUG-PPRG di Kabupaten Sleman. Intervensi ini merupakan tindaklanjut pelembagaan PUG-PPRG di tingkat desa yang sudah didorong pada tahun 2019.

Intervensi Program

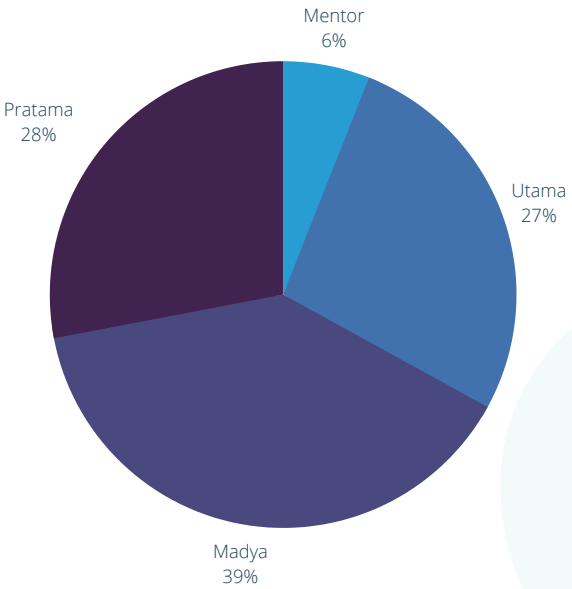


Proses monev PUG 144 desa di Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan workshop pembekalan substansi, metode dan teknis monitoring dan evaluasi dibagi 7 cluster. hasil dari monev terdapat 109 desa yang secara lengkap melakukan monev dan menyertakan bukti-bukti pendukung dan sebanyak 35 desa

tidak melengkapi proses monev. Hasil dari monev menunjukkan sebanyak 6% atau 6 kalurahan masuk kategori mentor yaitu Kalurahan Ngeposari, Ngunut, Botodayan, Plembutan, Baleharjo dan Umbulrejo. kategori utama sebanyak 27% dan mayoritas kalurahan masuk kategori madya (39%) atau sebanyak 49 kalurahan, lainnya masuk kategori pratama (29%).

Hasil monev ini diharapkan mampu memicu kalurahan untuk meningkatkan komitmen implementasi PUG dan PPRG dengan melaksanakan 7 prasyarat PUG secara konsisten dan berdampak kepada pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Selain itu, kalurahan yang masih masuk kategori madya dan pratama terpacu untuk meningkatkan program-program pengarusutamaan gender di kalurahan, sehingga upaya kesetaraan gender di tingkan kalurahan yang berkontribusi terhadap peningkatan indeks pemberdayaan gender di tingkat kabupaten akan berjalan maksimal.

Hasil Monev PUG-PPRG Kalurahan



Salah satu kalurahan yang sudah masuk kategori mentor yaitu Kalurahan Plembutan Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2020 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengeluarkan surat keputusan BPD No. 1/KPTS/2019 tentang pembentukan panitia musyawarah desa penyusunan rencana kerja pemerintah desa Plembutan tahun 2020. Dalam keputusan ini salah satunya memutuskan tentang tugas dan wewenang panitia penyelenggara musyawarah desa serta mengamanatkan untuk pemenuhan aksesibilitas bagi kelompok rentan termasuk mempersiapkan alat kerja yang aksesibel, menyediakan penerjemah, bahasa isyarat dan/atau tayangan narasi pembahasan dan pendamping khusus bagi yang memerlukan.

Perdes ini direview bersama pemerintah desa, BPD, kelompok Mutiara Plembutan dan unsur lain untuk memastikan implementasi PUG dalat berjalan lebih maksimal. Dalam proses review disepakati pentingnya pelembagaan PUG melalui peraturan desa tentang pelaksanaan PUG di desa.

Hal serupa juga terjadi di kabupaten Sleman, Desa Condongcatur telah menerbitkan Peraturan Kalurahan tentang implementasi PUG. Kalurahan ini juga telah melaksanakan berbagai program PUG yang menyebar hampir di semua dusun dengan tema-tema yang berbeda. Misalnya dusun anti narkoba yang melibatkan remaja dan kampanye dan program-programnya serta berbagai program lain. Kalurahan ini merupakan salah satu kalurahan terbaik yang melaksanakan program pengarusutamaan gender.

Hasil Program

- Kalurahan Condoncatur telah memiliki Peraturan Kalurahan tentang PUG dan Rencana Aksi Kalurahan pelaksanaan PUG-PPRG.
- Kabupaten Sleman telah menerbitkan panduan penyusunan Rencana Aksi PUG di tingkat kalurahan.
- 144 desa di Kabupaten Gunungkidul telah terlibat dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat kalurahan.

Dampak Program

- **Proses monitoring dan evaluasi PUG-PPRG di Kabupaten Gunungkidul berdampak pada menguatkan partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan penganggaran. Misalnya di Desa Plembutan, dengan adanya Perdes partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan penganggaran desa yang responsif gender, partisipasi kelompok rentan meningkat menjadi 40% dari 20% (wawancara Kepala Desa Plembutan, Ibu Edi, Tahun 2020).**
- **Desa Condongcatur Sleman, dengan adanya Rencana Aksi Kalurahan tentang PUG-PPRG di menjadikan program-program kalurahan lebih tepat sasaran, misalnya penguatan kelompok wanita tani, pengelolaan sampah, rumah sehat, pengembangan batik ecoprint dan keluarga sadar gender.**



BAGIAN 03

Perubahan Kebijakan Pemanfataan Satu Data Kemiskinan untuk Penanggulangan Kemiskinan

A. Satu Data Kemiskinan

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Perpres Satu Data Indonesia Nomor 39 Tahun 2019. Perpres ini memayungi tata kelola data di sistem pemerintahan yang selama ini masih bermasalah. Implementasi satu data dapat digunakan untuk berbagai jenis isu dan sektor. IDEA secara konsisten dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mendorong satu data kemiskinan di DIY agar dapat data kemiskinan terintegrasi dan sasaran program lebih efektif.

IDEA memastikan kinerja pemerintah dalam pengelolaan satu data kemiskinan dapat meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran kemiskinan, meningkatkan akuntabilitas publik program penanggulangan kemiskinan dan memastikan pengelolaan pengetahuan sistem satu data dan tata kelola penanggulangan kemiskinan. Komitmen Pemda DIY untuk mewujudkan satu data kemiskinan dengan intensif melakukan koordinasi dan pertemuan update perkembangan satu data kemiskinan melalui pertemuan TKPKD DIY yang beranggotakan unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi, wakil masyarakat dan CSO. Secara legal, IDEA masuk dalam keanggotaan TKPKD DIY melalui SK Gubernur Nomor 159/TIM/2019, masuk dalam pokja pemberdayaan masyarakat.

Selain tata kelola data kemiskinan, IDEA juga memastikan bahwa sistem LAPOR menjadi bagian kepastian mekanisme pengaduan masyarakat atas program penanggulangan kemiskinan. Mekanisme ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan, kekeliruan dan program yang berulang, yang tidak perlu dan tidak tepat sasaran.

Intervensi Program

Dalam skema besar kerja-kerja IDEA, langkah yang selalu dipastikan adalah keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pemerintah. Intervensi program juga mengikuti situasi terkini di masyarakat maupun di level pemerintah. Mengingat intervensi program ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun, maka ada proses evaluasi di tingkat internal IDEA maupun pemerintah daerah.

Kegiatan review Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan adalah salah satu strategi untuk memastikan proses pelembagaan langkah pemerintah DIY terkait pemanfaatan satu data kemiskinan untuk penyusunan kebijakan. Catatan khusus yang harus dimasukkan dalam Ranperda adalah:

- **Satu data kemiskinan sebagai pijakan aksi dan kegiatan penanggulangan kemiskinan**
- **Masyarakat sebagai aktor utama dalam pengentasan kemiskinan.**
- **Perlu memasukkan korelasi data mikro dan makro. Selama ini intervensi penanggulangan kemiskinan lebih ke data mikro sementara data kemiskinan yang digunakan adalah data makro sehingga intervensi yang dilakukan masih belum maksimal untuk penurunan angka kemiskinan**
- Raperda belum di perkaya dengan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dan melibatkan masyarakat sebagai kontrol kebijakan anggaran program penanggulangan kemiskinan.

Di sisi yang lain, wujud konkret dari kebijakan satu data kemiskinan adalah tersedianya aplikasi satu data kemiskinan DIY http://simnangkis.jogjaprov.go.id/ yang telah memuat data DTKS, raport kemiskinan, e-lapor khusus kemiskinan yang terintegrasi dengan SP4N. Kabupaten/kota juga telah mengembangkan aplikasi simnangkis https://simiskin.bantulkab.go.id/ dan http://opendatapronangkis.bantulkab.go.id/, https://sikab.gunungkidulkab.go.id/, https://pemberdayaan.jogjakota.go.id, https://pbdtm.slemankab.go.id/public/.

Masing-masing sistem tersebut telah memuat data dan program kemiskinan.



Capaian Program

- 6 portal satu data kemiskinan DIY dan kabupaten/kota telah tersedia.
- Kelembagaan TKPKD DIY telah rutin melakukan koordinasi untuk pemanfaatan satu data kemiskinan DIY dan proses rakor yang lebih produktif.
- Tata kelola data kemiskinan akan selalu dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan DIY untuk perbaikan sasaran program.
- Perlu di pertegas intervensi program apakah akan menyasar pada data makro-BPS atau mikro DTKS dengan konsekuensi jika fokus pada data mikro maka tidak akan banyak berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan yang sudah ditargetkan oleh DIY. Jika fokus pada data makro maka bisa melakukan intervensi terhadap pengeluaran makanan dan non makanan.
- TKPKD DIY menyepakati adanya proses dan mekanisme pertukaran data kemiskinan, program/kegiatan, dan anggaran kemiskinan antara kabupaten/kota dengan propinsi.
- Monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan secara rutin melalui raport kemiskinan.

Intervensi



Perubahan yang terjadi

IDEA memastikan kinerja pemerintah dalam pengelolaan satu data kemiskinan dapat meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran kemiskinan, meningkatkan akuntabilitas publik program penanggulangan kemiskinan dan memastikan pengelolaan pengetahuan sistem satu data dan tata kelola penanggulangan kemiskinan. Komitmen Pemda DIY untuk mewujudkan satu data kemiskinan dengan intensif melakukan koordinasi dan pertemuan update perkembangan satu data kemiskinan melalui pertemuan TKPKD DIY yang beranggotakan unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi, wakil masyarakat dan CSO. Secara legal, IDEA masuk dalam keanggotaan TKPKD DIY melalui SK Gubernur Nomor 159/TIM/2019, masuk dalam pokja pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah DIY telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Kemiskinan, IDEA melakukan advokasi untuk memastikan proses pelembagaan langkah pemerintah DIY terkait pemanfaatan satu data kemiskinan untuk penyusunan kebijakan. Usulan IDEA yang harus dimasukkan dalam Ranperda adalah:

- Satu data kemiskinan sebagai pijakan aksi dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
- Masyarakat sebagai aktor utama dalam pengentasan kemiskinan.
- Perlu memasukkan korelasi data mikro dan makro. Selama ini intervensi penanggulangan kemiskinan lebih ke data mikro sementara data kemiskinan yang digunakan adalah data makro sehingga intervensi yang dilakukan masih belum maksimal untuk penurunan angka kemiskinan

- Raperda belum di perkaya dengan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dan melibatkan masyarakat sebagai kontrol kebijakan anggaran program penanggulangan kemiskinan.

Perubahan Kebijakan

- Terbitnya Perda DIY nomor 11 tahun 2019 dikeluarkan pada Desember 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dimana IDEA terlibat dalam pembahasan Ranperda di DPRD DIY. selama 4 kali. Usulan IDEA masuk dalam pasal 11 yang berisi tentang data kemiskinan yang terintegrasi menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan bagi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten / kota, pemerintah desa dan kecamatan serta lembaga lainnya. Verifikasi dan validasi data dilakukan secara rutin juga tertuang dalam Perda pasal 11 dimana data kemiskinan dimutakhirkan secara berkala melalui verifikasi dan validasi serta hasil pemutakhiran data kemiskinan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan ditempatkan pada sistem informasi pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan tujuan besar program pemanfaatan data kemiskinan tunggal untuk meningkatkan program penanggulangan kemiskinan.
- TKPKD Kabupaten Bantul dan Kulon Progo menggunakan analisis pro poor budgeting yang dilakukan IDEA untuk penyusunan program, kegiatand an anggaran Tahun 2021.
- 4 Desa di Bantul dan Kulon Progo (Desa Bawuran, Desa Pleret, Desa Sendangsari dan Desa Guwosari) menggunakan analisis APBD pro poor dan pro gender untuk bahan penyusunan APBDesa Tahun 2021.
- 4 Desa di Bantul dan Kulon Progo (Desa Bawuran, Desa Pleret, Desa Sendangsari dan Desa Guwosari) menggunakan analisis APBD pro poor dan pro gender untuk bahan penyusunan APBDesa Tahun 2021.
- 4 desa yang menjadi pilot project mengembangkan Sistem Informasi Desa Berbasis GIS. (Sistem Informasi Geografis), membantu desa dalam pendataan masyarakat miskin dan digunakan sebagai dasar perencanaan wilayah dan desa pada tahun 2020 dan pendataan penerima bantuan langsung tunai untuk penanggulangan Covid 19.



Perubahan di aras komunitas

- 50 kelompok rentan di meningkatkan kapasitas perempuan dan kelompok marjinal dalam mengadvokasi proses penganggaran yang berpihak pada kaum miskin dan perencanaan gender. Berdasarkan hasil pretest training diperoleh nilai peserta 8,2 dari 25 peserta dan posttest 9,4. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dalam hal pengetahuan dan pemahaman tentang materi yang disampaikan dalam pelatihan yang meliputi perencanaan penganggaran desa, gender, disabilitas, PRA, UU Desa dan KIP.
- 50 kelompok rentan telah memiliki forum akuntabilitas sosial untuk pemantauan program penanggulangan kemiskinan, yang akan melakukan pemantauan program stuntingd i Kulon Progo dan program layanan jaminan kesehatan di Kabupaten Bantul.



Forum Jarlindes dan Segersari

Forum Jaringan lintas desa atau disingkat dengan Jarlindes adalah sebuah forum yang beranggotakan perwakilan kelompok masyarakat seperti SPPR Bunda mandiri Desa Bawuran, Kelompok P2WKSS Desa Bawuran, Kelompok PEKA Desa Bawuran, Karangtaruna Desa Bawuran dan Bangunjiwo, kelompok IMP Desa Bangunjiwo, BPD Desa Bawuran dan Bangunjiwo serta PBA di Kabupaten Bantul. Forum Jarlindes terbentuk pada tanggal 5 November 2020. Forum Jarlindes memilih program Jamkesda dan program KUPK untuk mereka monitoring. Kegiatan memonitoring program pemerintah desa maupun kabupaten merupakan pengalaman baru bagi mereka dan harapannya mereka dapat melakukan pemantauan program-program lainnya di masa mendatang untuk pembangunan yang lebih baik.

Forum Segersari yang merupakan singkatan dari nama Desa Sendangsari dan Gerbosari terdiri dari Pemerintah Desa Gerbosari, BPD Desa Gerbosari dan Sendangsari, Kelompok P2WKSS Desa Gerbosari, Karang taruna Desa Gerbosari dan Sendangsari, Kelompok kader kesehatan Desa Sendangsari, Jarik Rogo dan JMKP di Kulon Progo. Forum Segersari terbentuk pada 12 November 2020. Kedua forum tersebut bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat melalui pemantauan pembangunan khususnya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan melakukan advokasi terhadap persoalan warga disekitar mereka. Pada Desember 2020 sampai Februari 2021, kedua forum tersebut melakukan monitoring program pemerintah desa dan kabupaten. Forum Segersari memilih program

BAGIAN 04

Keterbukaan Kontrak

A. Keterbukaan kontrak untuk perbaikan tata kelola air bersih

Isu keterbukaan kontrak merupakan isu baru di Indonesia dan telah didorong beberapa organisasi masyarakat sipil untuk pengembangan di nasional dan daerah. IDEA bekerjasama dengan CRPG melakukan baseline study tata kelola air bersih terutama layanan PDAM Tirta Dharma Kabupaten Bantul, DIY. Cakupan air bersih Pemda Bantul sampai tahun 2019 baru mencapai 91% dari total penduduk 995.264 jiwa. Cakupan tersebut terdiri dari 22% atau 223.734 jiwa dikelola oleh PDAM dan sisanya kelola oleh PAMSIMAS dan masyarakat (sumur gali dll). Sayangnya masih banyak keluhan (sambungan air sering mati) pelanggan terkait dengan pemenuhan air bersih yang dikelola oleh PDAM.



Intervensi program fokus kepada penguatan kelompok rentan pengguna air bersih khususnya perempuan dan difabel di Kabupaten Bantul untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaan air bersih mulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Disisi pemerintah daerah dan pengelola air bersih, IDEA mendorong adanya keterbukaan informasi kebijakan air bersih dan penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan air bersih. Melalui intervensi dua belah pihak ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan air bersih di Kabupaten Bantul yang dampaknya akan meningkatkan pelayanan publik air bersih kepada konsumen khususnya kelompok rentan. Kelompok yang diintervensi adalah: 1) Kelompok Pedagang Jamu Kecamatan Sedayu, 2) Warga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kasihan, 3) Kelompok Desa PRIMA di Kecamatan Dlingo, dan untuk kelompok difabel melibatkan kelompok Pinilih yang berasal dari Kecamatan Sedayu.

Persoalan yang ada di kabupaten Bantul, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul kualitas air bersih di Kabupaten Bantul mengalami penurunan di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : 1) wilayah Kabupaten Bantul yang secara geografis berada pada bagian hilir dan terletak di sisi selatan DIY, banyak sungai besar mengalir ke selatan menyebabkan Bantul mendapat limpahan air yang berupa residu dari wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, 2) Terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bantul yang menjadi tempat pembuangan akhir dari wilayah Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta.

Hal tersebut mengakibatkan air tanah tercemar mineral zat besi (Fe) dan mangan (Mn), 3) Pembangunan Jamban yang tidak memenuhi standar baku dan pembuangan limbah rumah tangga serta industri yang meresap ke tanah sehingga menyebabkan air tanah tercemar bakteri e-coli. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi -

stakeholder di Kabupaten Bantul untuk dapat menyediakan air bersih layak konsumsi bagi warga masyarakatnya.
Intervensi program melalui peningkatan kapasitas ini diikuti oleh 24 orang perwakilan kelompok rentan mitra dampingan lembaga.

Disisi pemerintah daerah dan pengelola air bersih, IDEA mendorong adanya keterbukaan informasi kebijakan air bersih dan penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan air bersih. Melalui intervensi dua belah pihak ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan air bersih di Kabupaten Bantul yang dampaknya akan meningkatkan pelayanan publik air bersih kepada konsumen khususnya kelompok rentan. Kelompok yang diintervensi adalah: 1) Kelompok Pedagang Jamu Kecamatan Sedayu, 2) Warga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kasihan, 3) Kelompok Desa PRIMA di Kecamatan Dlingo, dan untuk kelompok difabel melibatkan kelompok Pinilih yang berasal dari Kecamatan Sedayu.

Persoalan yang ada di kabupaten Bantul, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul kualitas air bersih di Kabupaten Bantul mengalami penurunan di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : 1) wilayah Kabupaten Bantul yang secara geografis berada pada bagian hilir dan terletak di sisi selatan DIY, banyak sungai besar mengalir ke selatan menyebabkan Bantul mendapat limpahan air yang berupa residu dari wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, 2) Terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bantul yang menjadi tempat pembuangan akhir dari wilayah Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta.

Hal tersebut mengakibatkan air tanah tercemar mineral zat besi (Fe) dan mangan (Mn), 3) Pembangunan Jamban yang tidak memenuhi standar baku dan pembuangan limbah rumah tangga serta industri yang meresap ke tanah sehingga menyebabkan air tanah tercemar bakteri e-coli. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi stakeholder di Kabupaten Bantul untuk dapat menyediakan air bersih layak konsumsi bagi warga masyarakatnya.
Intervensi program melalui peningkatan kapasitas ini diikuti oleh 24 orang perwakilan kelompok rentan mitra dampingan lembaga.

Dari proses engagement penguatan basis terutama kelompok rentan dan advokasi kebijakan, kapasitas kelompok rentan yang diwadahi dalam Paguyuban Tirto Wening kapasitasnya meningkat dalam hal pemahaman informasi anggaran dan tata kelola air bersihtentang pengelolaan air bersih dan sistem pengadaan barang dan jasa di sektor air bersih.

Hasil Program

- Meningkatnya kapasitas kelompok rentan khususnya perempuan dan difabel tentang tata kelola air bersih di kabupaten Bantul.
- Terbentuknya Paguyuban Tirto Wening sebagai wadah komunikasi konsumen dan calon konsumen air bersih terkait dengan persoalan air bersih di Kabupaten Bantul.
- Paguyuban Tirto Wening telah mendesakkan perubahan anggaran untuk penyediaan air bersih dalam APBD 2021 sebesar Rp.12,7 Milyar.
- Pelembagaan mekanisme monitoring tata kelola air bersih secara partisipatif dengan pelibatan kelompok rentan disepakati bersama dengan pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam hal ini PDAM, Dinas PU.

Dampak Program

Advokasi perbaikan tata kelola Air bersih sangat berkaitan erat dengan isu lain, seperti
1) Ketersediaan air bersih sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim dan lingkungan. Perubahan musim yang tidak dapat lagi diprediksi secara tepat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengantisipasi bencana kekeringan di sejumlah wilayah di Bantul yang berlangganan kekeringan setiap tahunnya

2) Ketersediaan air bersih sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan keluarga ; 3) Kualitas dan ketersediaan air bersih juga dapat berimplikasi terhadap isu stunting dan kesehatan masyarakat.

Perubahan kebijakan dengan perbaikan tatak kelola air bersih akan berdampak kepada sektor lain yang berpengaruh kepada kualitas kesehatan dan ketahanan pangan.

Kelompok rentan lebih banyak dilibatkan dalam proses pengorganisasian baik level kecamatan maupun level kabupaten, pertemuan warga di level kabupaten telah melibatkan 24% warga difabel dan 56% warga miskin, dan dilevel kecamatan melibatkan lebih dari 70% perempuan miskin dan difabel dari total penerima manfaat program.

Dari semua kegiatan yang melibatkan teman difabel terdapat wakil kelompok rentan yang secara konsisten berpartisipasi yaitu Mulat Wahyu W, Slamet Mulyana dan Basuki dari kelompok Pinilih Kecamatan Sedayu. Kemudian untuk warga perempuan miskin yang konsisten berpartisipasi yaitu Rita dan Sugimah dari Kelompok Desa Prima Kecamatan Dlingo.

PAGUYUBAN TIRTO WENING

Paguyuban Tirto Wening terdiri dari kelompok perempuan pedagang Jamu Jati Husada Mulya (JHM) di Kecamatan Sedayu, kelompok perempuan Desa Prima di Kecamatan Dlingo, kelompok perempuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kasihan dan kelompok difabel Pinilih di Kecamatan Sedayu.

Melalui pengorganisasian yang telah dilakukan secara tatap muka paguyuban Tirto Wening berhasil menyampaikan 7 usulan tentang persoalan tata kelola air bersih kepada Pemerintah Kabupaten Bantul. Dari 7 usulan yang disampaikan oleh perwakilan paguyuban Tirto Wening tersebut terdapat satu usulan yang diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yakni usulan tentang penambahan jaringan perpipaan baik dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ataupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) untuk empat desa di Kecamatan Dlingo antara lain Desa Dlingo (Dusun Kebosungu I dan Kebosungu II), Desa Terong (Dusun Rejosari dan Dusun Terong II), Desa Mangunan (Dusun Gumelem), dan Desa Muntuk dengan memasukkannya ke dalam Dokumen Perencanaan APBD 2021.

Usulan tersebut sudah dimasukkan kedalam salah satu program Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai dinas pelaksana dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,7 miliar.



BAGIAN 05

RESPON PANDEMI COVID 19
Pemantauan tata kelola anggaran penanganan Covid 19

A. Pemantauan Anggaran refocusing Covid 19

Pemda DIY mengeluarkan regulasi penanganan Covid-19 meliputi penetapan masa tanggap darurat, pembentukan gugus tugas penanganan Covid-19, regionalisasi laboratorium dan pemberian bantuan sosial. Sayangnya dalam aturan ini tidak ada pasal yang menyebutkan terkait transparansi dan mekanisme pengawasan.

Regulasi yang terdapat ketentuan terkait keterlibatan masyarakat ialah Instruksi Gubernur No 2/ 2o2o tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Coronavirus Disease (Covid-19). Dalam Ingub tersebut terdapat pasal yang menyebutkan tentang peran serta masyarakat dalam pengendalian resiko penularan, namun tidak dalam hal pengawasan.

Sementara terkait penanganan dampak Covid-19, melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107/KEP/2020, Pemda DIY memberikan bantuan sosial tidak hanya kepada warga lokal DIY, namun juga kepada mahasiswa luar yang tinggal di asrama. Adapun bantuan yang diberikan berupa paket sembako. Untuk warga DIY dari kelompok rentan seperti Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas diberikan pada bulan April, Mei dan Juni 2020 senilai Rp, 300.000. Sedangkan untuk mahasiswa yang tinggal di asrama hanya diberikan pada bulan Mei 2020 senilai Rp, 248.500.

Selaiin provinsi, Kabupaten/Kota di DIY juga melakukan realokasi dan refocusing anggaran APBD untuk penanganan Covid 19.

Gambaran alokasi anggaran untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Gunungkidul terdapat dalam tabe dibawah. Sumber anggaran hasil refocusing dana tidak terduga APBD Gunungkidul. Total anggaran di tiga dinas dan dua RSUD pelaksana tugas penanganan covid-19 di Gunungkidul tersebut sebanyak Rp. 59.678.124.968. Anggaran terbanyak dialokasikan kepada dinas kesehatan Rp. 18.240.942.268.

Jika dilihat dari aspek kegiatan, anggaran terbesar yang dialokasikan Pemkab Gunungkidul ialah terkait kegiatan pencegahan dan penanggulangan covid-19, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.174.983.790. Kegiatan tersebut dikelola oleh Dinas Kesehatan Gunungkidul. Selain itu Dinas Kesehatan juga melakukan pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan yang mendapat alokasi sebesar 6.869.772.188.

Anggaran untuk kegiatan Penyediaan bahan Pangan untuk Pekerja Sektor Informal dan Kelompok Lain yang Terdampak Covid-19, yaitu Rp. 6.921.600.000. Kegiatan tersebut dikelola oleh Dinas Sosial Gunungkidul. Namun, kegiatan-kegiatan yang mendapat porsi anggaran besar tersebut tidak diiringi dengan transparansi informasi. IDEA sudah mengecek data pengadaan di LPSE Pemkab Gunungkidul, namun tak ada satu pun data pengadaan yang dipublikasikan selama masa tanggap darurat penanangan covid-19.

Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan APBD Perubahan untuk penanganan covid-19. Total APBDP sebanyak 1.624.995.095.750.

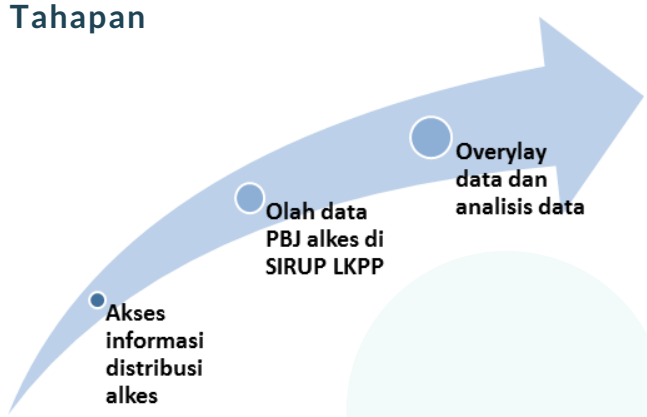
Anggaran paling banyak dari APBDP tersebut dialokasikan untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang mencapai Rp. 448.505.957.698 disusul Badan Pengelola Keuangan Daerah Rp. 407.650.073.893. Alokasi tersebut dua kali lipat lebih banyak dibanding anggaran untuk penanganan kesehatan. Berdasarkan data APBDP, alokasi untuk penanganan kesehatan dikelola oleh RSUD Wates sebanyak RP. 167.167.590.559, RSUD Nyi Ageng Serang sebanyak 21.258.352.264, serta dinas kesehatan sebanyak 133.123.910.173.

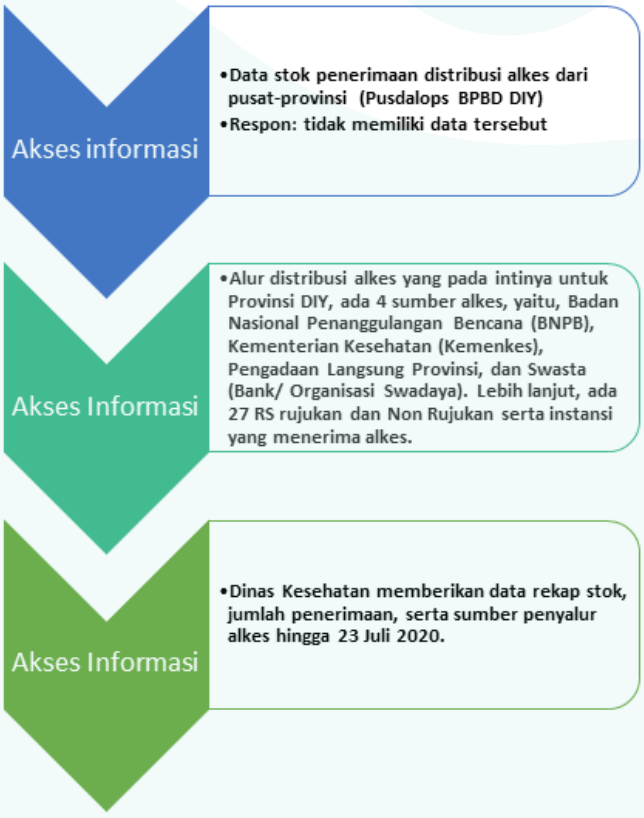
Alokasi tak kalah banyak justru masih dikelola oleh dinas Kebudayaan, yaitu sebanyak Rp. 91.036.503.380 dan dinas Pekerjaan Umum sebanyak Rp. 84.155.728.121. Besarnya alokasi untuk dinas-dinas yang tidak menjadi pelaksana prioritas penanganan covid-19, seperti Dikpora, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum patut dipertanyakan. Apalagi jika mengacu terhadap prioritas penanganan covid-19 nasional yang menekankan kepada penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi.

Keterbukaan informasi pemkab Kulon Progo juga belum maksimal, mengingat dokumen yang diberikan masih belum menunjukan rincian program/kegiatan. Sama halnya dengan Kabupaten Gunungkidul dan Sleman, Kabupaten Kulon Progo juga tidak mempublikasikan kegiatan Pengadaan untuk penanganan Covid 19 di LPSE Pemda Kulon Progo.

B. Pemantauan Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ) Alat Kesehatan untuk Penanganan Covid 19

Tahapan





Temuan

Paket Pengadaan

- Bulan Mei-Agustus tahun 2020, pemerintah DIY telah merencanakan 34 paket pengadaan alat kesehatan untuk penanganan covid-19 di DIY. Pengadaan tersebut tersebar di beberapa satuan kerja pemda DIY.
- Dari 34 rencana paket pengadaan di Pemda DIY, hampir 50 % akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, yaitu sebanyak 16 paket. Selebihnya, rencana paket pengadaan akan dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DIY sebanyak 9 paket, Sekretariat DPRD sebanyak 4 paket, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 2 paket, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebanyak 2 paket, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 1 paket.
- Anggaran yang dialokasikan dari APBD DIY untuk rencana pengadaan Rp. 2.342.787.875 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan. Metode pengadaan langsung, 5 darurat, 4 penunjukan langsung dan hanya 1 paket yang menggunakan metode tender. Kemudian, jika ditelaah lebih lanjut, dari 24 paket rencana pengadaan yang menggunakan metode pengadaan langsung, ada 1 paket yang nilai pagunya lebih dari Rp 200 juta, yaitu rencana pengadaan Masker N-95 yang nilainya mencapai hingga Rp 940.000.000. Padahal, sebagaimana diatur dalam Perpres 16/ 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, bahwa pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat menggunakan metode pengadaan langsung jika nilai pengadaanya paling banyak Rp200 juta.

- Dilihat dari jenis pengadaan, rencana pengadaan Pemda DIY paling banyak ialah pengadaan barang, yaitu sebanyak 30 atau 91 % dari total rencana paket pengadaan. Selebihnya ialah berupa Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya, masing-masing sebanyak 2 paket.

Transparansi

- Pemerintah Provinsi serta kabupaten/kota di DIY kurang transparan dalam mempublikasikan data pengadaan almatkes untuk penanganan covid-19. Berdasarkan penelusuran IDEA, tidak ada satupun kabupaten/kota yang mempublikasikan paket PBJ di LPSE. Sementara pemprov DIY hanya mempublikasikan 6 paket pengadaan yang terkait dengan Almatkes penanganan covid-19, 5 paket bersumber dari APBD sementara 1 paket bersumber dari APBN.

Akuntabilitas

- Pemda DIY baru mengeksekusi sebanyak 14 % pengadaan, padahal berdasarkan penelusuran IDEA, waktu pemilihan yang direncanakan pemda DIY, paling akhir ialah pada bulan Agustus 2020.
- Berdasarkan penelusuran IDEA ke salah satu penyedia yang menang dengan jenis metode pemilihan pengadaan langsung, IDEA menemukan adanya pengabaian aspek pengalaman yang dilakukan pemda DIY dalam memilih penyedia. CV Mitra Tani misalnya, perusahaan yang menjadi penyedia dalam pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan, Bahan Kimia, dan Peralatan/Perlengkapan untuk Kebutuhan Penanganan COVID – 19, justru memiliki banyak pengalaman sebagai penyedia produk-produk pertanian dan peternakan. IDEA tidak menemukan pengalaman perusahaan ini dalam melakukan pengadaan barang/produk farmasi.

Ketidaksinkronan Data Distribusi dan Realisasi Alkes

- Menurut Data BNPB, per tanggal 26 April hingga 30 Juni, provinsi DIY mendapat bantuan APD Coverall dari BNPB sebanyak 64.240 buah. Namun, jika dibandingkan dengan data penerimaan APD Dinkes DIY, per tanggal 01 Maret hingga 23 Juli, bantuan coverall yang diterima DIY dari BNPB baru sebanyak 5.900 buah. Walaupun digabung dengan 29.750 buah coverall yang diterima DIY dari kemenkes, total coverallnya baru berjumlah 35.650. Artinya, data distribusi coverall BNPB tidak sesuai dengan data penerimaan yang dimiliki oleh DIY.
- Ketidaksesuaian data distribusi dan penerimaan juga terlihat pada barang Masker Bedah. Dalam data BNPB, Masker Bedah yang sudah didistribusikan ke DIY per tanggal 21 April hingga 30 Juni mencapai 366.500. Sedangkan menurut data penerimaan masker bedah Dinkes DIY, per tanggal 01 Maret hingga 23 Juli, provinsi DIY baru mendapat bantuan 7000 buah masker bedah. Selisihnya ketidaksesuaian mencapai hingga 359.500 buah.
- Ketidaksesuaian antara data distribusi dan penerimaan juga terjadi pada Rapid Diagnostic Test (RDT). Dalam data BNPB, per tanggal 21 April hingga 30 Juli, BNPB sudah mendistribusikan 34.800 buah Rapid Test. Padahal, data dinkes DIY menunjukkan bahwa distribusi 'RDT Covid-19 (SARS-CoV-2) Wondfo dan RDT Antigen COVID-19 (SD Biosensor) dari BNPB ke DIY baru sebanyak 17.025.

Rekomendasi

- Transparansi anggaran penangana Covid 19.
- Perbaikan kinerja Gugus Tugas Penangana Covid 19.
- Perbaikan tata kelola data distribusi almatkes.

C. Monitoring Bantuan Sosial Covid 19

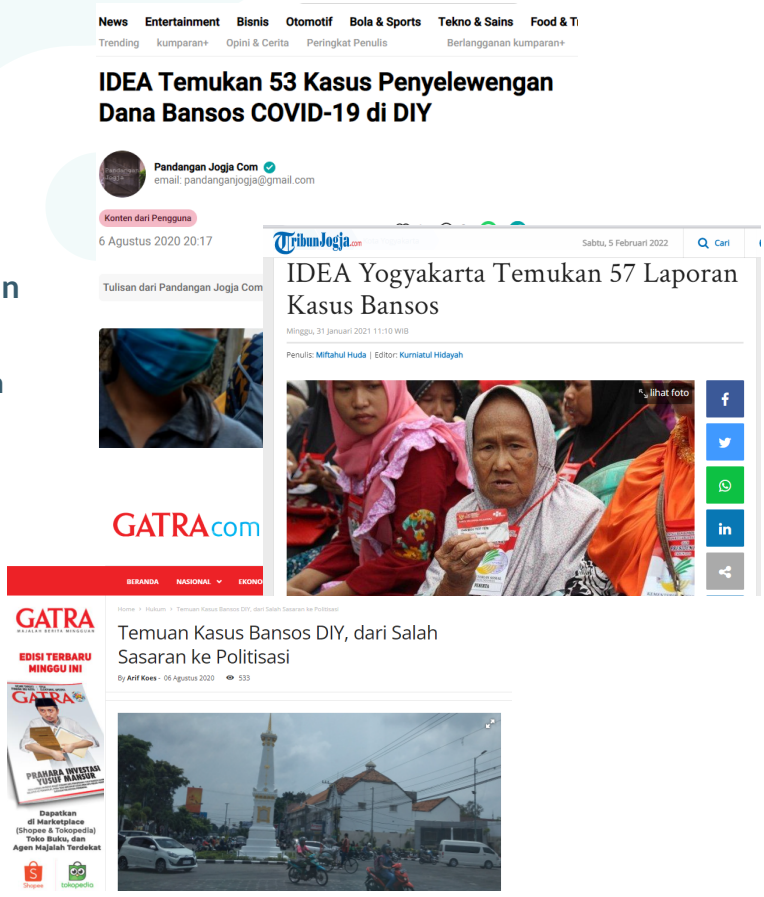


Temuan

- Penyaluran jenis-jenis bantuan sosial dalam waktu yang bersamaan dengan data yang belumm divalidasi.
- Ketidaktepatan sasaran bantuan sosial BLT Dana Desa.
- Penggelapan dana bantuan sosial (PKH dan BNPT)
- Pungutan liar dana bantual sosial
- Politisasi dana bantuan sosial

Keberhasilan, Tantangan, dan Hambatan Pemantauan

- Adanya laporan warga yang disampaikan melalui Whatsapp, telepon, dan langsung bertemu. Hal ini memperlihatkan bahwa publikasi, kampanye, dan turun langsung ke desa memang efektif mendorong kesadaran dan keberanian warga untuk melaporkan. Laporan warga yang disampaikan juga sudah diverifikasi, termasuk laporan terkait politisasi yang melibatkan partai politik di kabupaten Sleman.
- Akses informasi distribusi almatkes masih memanfaatkan jalur informal, karena jalur formal tidak memperoleh akses informasi.
- KPK merespon pemantauan kolaboratif untuk program pencegahan korupsi, terutama kasus bantuan sosial.
- Keterbukaan informasi dalam penanganan covid-19 di DIY masih rendah. Informasi terkait kebencanaan, baik dari aspek perencanaan, anggaran, kegiatan dan pengawasan belum mendapat porsi yang besar untuk dibuka kepada publik. Dari data yang didapat IDEA, anggaran penanganan covid-19 diberikan hanya berdasarkan permintan, itupun tidak mencantumkan secara detail kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
- Pengadaan barang dan jasa juga masih tertutup, ada 5 informasi dari 35 rencana umum pengadaan yang dilakukan Pemda DIY.



Rekomendasi

- Pemda DIY dan Kemensos agar melakukan pembaruan dan sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial di DIY.
- Pemerintah pusat membuat aturan tata kala penyaluran bantuan sosial, baik bantuan kementerian, provinsi, kab/kota, hingga desa di masa pandemi atau bencana nasional di masa yang akan daring.
- Pemerintah pusat, pemda dan Gugus Tugas DIY harus patuh terhadap UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya menyangkut informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana tercantum dalam pasal 10 UU tersebut. Informasi tersebut harus disediakan serta merta, mudah diakses dan detail.
- Pemda DIY harus membuka data PBJ di masa pandemic dan bencana-bencana lainnya di masa yang akan datang, agar publik dapat turut berpartisipasi dan memastikan kegiatan pengadaan berjalan efektif, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.



BAGIAN 06

Audit Sosial untuk Pengawasan Pembangunan

Audit sosial merupakan proses pemantauan pelaksanaan program pemerintah yang dilakukan secara partisipatif oleh warga. IDEA secara konsisten melakukan kampanye, pelatihan, praktek audit sosial dan pelembagaan audit sosial di berbagai daerah dan berbagai isu sejak 7 tahun terakhir.

Audit sosial merupakan proses pemantauan pelaksanaan program pemerintah yang dilakukan secara partisipatif oleh warga. IDEA secara konsisten melakukan kampanye, pelatihan, praktek audit sosial dan pelembagaan audit sosial di berbagai daerah dan berbagai isu sejak 7 tahun terakhir. Strengthening Public services through the Empowerment of women-led Advocacy and social audit networKs (SPEAK) merupakah salah satu program menjaga konsistensi gerakan IDEA dalam melembagan audit sosial. Selain itu, IDEA juga melembagaan audit sosial di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo.

Intervensi program



Tahapan pelembagaan audit sosial yang dilakukan IDEA dengan mengintervensi CSO lokal, kelompok-kelompok perempuan dan kelompok rentan mampu melakukan audit sosial. Selain itu, mereka juga diintervensi agar mampu melakukan penanganan aduan mulai dari mendorong waraga melapor, mengawal tindak lanjut aduan.



Hasil Program

Walikota Semarang Lembagakan Musrenbang Perempuan dalam Visi Misi Walikota

Pada 3 September 2020, Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu, dalam visi misi yang diusung menjadikan Musrenbang perempuan sebagai sub program prioritas untuk mendukung program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dukungan dari istri Wali Kota Semarang yang menjabat sebagai Ketua PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) dan Dinas PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam mewujudkan penganggaran responsif gender untuk Kota Semarang adalah upaya advokasi IDEA dan Pattiro Semarang dengan melibatkan seluruh anggota PKK se Kota Semarang.

Selain mendorong partisipasi perempuan dalam musrenbang, audit sosial sebagai bagian kontrol publik atas anggaran daerah juga membawa dampak perubahan bagi perempuan dan CSO di Kota Semarang dan Kabupaten Bojonegoro.

Koalisi masyarakat sipil di Bojonegoro menyepakati lima isu prioritas yaitu,

1. Akses beasiswa bagi siswa di Bojonegoro
2. Sekolah akses disabilitas (Sekolah Ramah difabel).
3. Kesehatan reproduksi remaja
4. Kesehatan lanjut usia
5. Stunting

Sementara itu di Semarang, koalisi masyarakat sipil dan kelompok perempuan menyepakati lima isu prioritas yaitu,

1. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) di tingkat desa
2. Kenakalan remaja
3. Kesehatan reproduksi remaja
4. Sekolah akses disabilitas (Sekolah Ramah difabel)
5. Pelayanan ramah kepada kesehatan disabilitas

Proses yang dilakukan dengan melatih 5 pemimpin komunitas perempuan dari setiap daerah dengn modul yang sudah dikembangkan IDEA untuk menjadi pelatih dalam Mekanisme Penanganan Keluhan (CHM) dan pelatihan Audit Sosial di wilayah mereka dan mereka berhasil melatih komunitas perempuan di setiap kota. Pendekatan paling sukses dalam proyek ini adalah Di Bojonegoro, dua kader SPEAK setempat berkomunikasi dengan kelompok perempuan melalui kedekatan budaya organisasi keagamaan (Nahdliyin). Kesamaan latar belakang mereka telah mendukung kader SPEAK di Bojonegoro untuk melaksanakan kegiatan program.

Dampak Program

Sepuluh tokoh masyarakat (lima dari Bojonegoro dan lima dari Kota Semarang) mampu menjadi fasilitator pelatihan untuk pertama kali pada akhir November 2020. Komunitas perempuan di Desa Nongkosawit, Kota Semarang dengan didampingi lima tokoh masyarakat mampu merumuskan impiannya untuk Desa Nongkosawit. Hal yang sama terjadi di Bojonegoro, komunitas SPEAK pasca pelatihan CHM dan Audit Sosial mampu merumuskan perubahan cita-cita tentang kesehatan reproduksi remaja di Bojonegoro.

Salah satu pertemuan sosialisasi advokasi di Semarang, tim IDEA dan PATTIRO Semarang telah berhasil bekerjasama dengan Ketua PKK (Dipimpin oleh Istri Walikota Semarang - Krisseptiana Hendrar Prihadi) dengan lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Dinas P3A). Hal ini terjadi karena Dinas P3A menilai pelaksanaan program SPEAK tahun 2019 perlu direplikasi dan disebarluaskan kepada seluruh kelompok perempuan di Kota Semarang untuk memahami konsep gender budgeting. Advokasi gender budgeting tidak hanya dengan pendekatan partisipasi tetapi juga membutuhkan pendekatan politik.



BAGIAN 7

Perbaikan Tata Kelola Pengurangan Resiko Bencana

Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB DIY) dalam respon Covid-19

IDEA bergabung dalam Whatssapp group Forum Pengurangan Resiko Bencana DIY sekitar akhir Maret 2020 untuk merespon Covid-19 di DIY yang selanjutnya di bagi beberapa cluster salah satunya Bidang Sosial Kemasyarakatan. Pembagian anggota dalam cluster berdasarkan ketertarikan maupun isu yang diampu oleh masing-masing lembaga maupun individu yang terlibat dalam forum PRB.

Anggota forum PRB terdiri dari Pemerintah daerah, NGO, relawan dan individu pegiat penanggulangan bencana. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam merespon Covid-19 dilakukan secara online maupun offline. IDEA terlibat dalam koordinasi bidang sosial kemasyarakat secara online untuk respon Covid 19, mulai dari penyusunan langkah-langkah strategis, intervensi kegiatan yang akan dilakukan.

Kasus Covid 19 adalah kasus baru dan berdampak kepada pemahaman dan kesadaran masih cukup rendah tentang pencegahan dan penanganan Covid. Banyak fasilitas umum seperti pasar, minimarket dll belum menyediakan tempat cuci tangan maupun hand sanitizer.

Dampak Covid juga dirasakakan oleh warga DIY karena pabrik, pasar, dan pusat kegiatan ekonomi tutup. Banyak desa maupun dusun melakukan penutupan jalan masuk/lockdown atas inisiatif warga sendiri karena kekhawatiran dan kecurigaan terhadap pendatang dari luar yang dianggap membawa virus Covid 19. Selain itu, Kelangkaan hand sanitizer, bahan disinfektan, masker terjadi hampir di semua wilayah. Dalam situasi demikian, mulai muncul solidaritas dari warga untuk saling membantu ketersediaan dan akses bahan pangan.

Intervensi Program

IDEA terlibat dalam rangkaian aktivitas yang disusun bersama dengan FPRB DIY, diantaranya adalah terlibat dalam koordinasi dengan gugus tugas covid yang ada di masing-masing wilayah untuk memantau situasi covid-19, redistribusi informasi bantuan dan pihak-pihak yang membutuhkan bantuan, serta memperkuat kinerja gugus tugas Covid 19.

- Audiensi dengan Bappeda DIY terkait dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 yang dilakukan secara offline pada November 2020 (IDEA tidak ikut hadir dlm kegiatan tersebut)
- Koordinasi SOP Pengelolaan Bantuan, Pengungsian, Manajemen Relawan, Koordinasi Informasi, Perlindungan Kelompok Rentan Erupsi Merapi, 25 November 2020 melalui zoom meeting
- Koordinasi SOP kedaruratan merapi FPRB DIY, 28 November 2020 melalui Zoom meeting
- Diskusi offline dengan BPBD Sleman terkait 4 SOP, 4 Desember 2020 (IDEA tidak ikut hadir). -

Rekomendasi dari kegiatan tersebut adalah: 1) Diskusi mempertajam detil isi SOP bersama dengan desa; 2)Gladi uji coba SOP termasuk memastikan tata kelola kerja posko utama.

- Diskusi offline dengan BPBD Sleman melanjutkan dari FGD sebelumnya, 6 Desember 2020 (IDEA tidak ikut hadir)
- Pembahasan materi dengan Dinkes DIY menindaklanjuti hasil audiensi FPRB dengan Bappeda dan Dinkes DIY untuk memberikan peningkatan kapasitas pada masyarakat kalurahan/kelurahan terkait dukungan pelaksanaan track, trace dan treatment. Kegiatan didukung oleh RedR melalui pusat rehabilitasi Yakkum. Peningkatan kapasitas tersebut akan diberikan kepada 150 kalurahan/kelurahan di 4 kab 1 kota bersama Dinkes DIY dank ab/kota.
- Sarasehan penanggulangan bencana (Catatan akhir di tahun pandemi Covid-19), 29 Desember 2020, 09.00-12.00 WIB dengan salah satu narasumbernya Ranie Hapsari sebagai perwakilan dari Forum PRB DIY.



Pandangan Forum PRB DIY terhadap RUU PB

Perda DIY no 13 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakartanomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana memandatkan bahwa pemerintah daerah beserta seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, media masa bersinergi untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Hal ini mencerminkan bahwa desentralisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi kekuatan daerah dalam membangun ketangguhan.

Sejalan dengan UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa terdapat beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meski penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi pada peraturan pemerintah no 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal ditetapkan bahwa penanggulangan bencana menjadi urusan wajib dalam pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu desentralisasi memiliki peran sangat penting untuk meningkatkan partisipasi daerah di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, dan politik berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pemberian otonomi akan mengembangkan kapasitas pemimpin lokal untuk memecahkan masalah dengan baik. Proses pembelajaran dalam pembuatan keputusan bagi pimpinan lokal merupakan instrument penting untuk mempercepat proses pemulihan akibat bencana bahkan dalam situasi mitigasi dan kesiapsiagaan.

Untuk mendukung semangat desentralisasi tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperkuat

1. Tata kelola dalam penyelenggaran PB

a. Kelembagaan

Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan seluruh urusan penyelenggaraan PB baik pada pra, saat dan pasca bencana. Kenyataannya ketika urusan PB ini dilekatkan pada salah satu sektor kedinasan, maka pelindungan bencana hanya dimaknai dalam situasi darurat saja. -

b. Fungsi koordinasi dan komando lintas sektor
Sudah saatnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan PB perlu diperkuat. Ego sectoral membuktikan fungsi koordinasi tidak jalan dan berakibat pada rendahnya ketangguhan daerah. Oleh karena itu fungsi koordinasi dan komando pada BPBD perlu dipertegas dalam situasi pra, saat dan pasca bencana.

c. Kapasitas sumberdaya manusia
Kompetensi dalam PB perlu dimaknai sebagai kapasitas yang diperlukan dalam mensinergikan urusan PB ke dalam rencana dan penyelenggaraan pembangunan, bersinergi dengan sektor lainnya, memiliki paradigma pengarustamaan dalam setiap rencana strategis pembangunan. Kompetensi ini hendaknya yang terus ditingkatkan dan diperkuat terutama bagi pemerintah daerah.

d. **Pendanaan**
Penganggaran pendanaan penyelenggaraan PB hendaknya dianalisis melalui Rencana Penanggulangan Bencana. Setiap element penyelenggara PB memiliki kapasitas keuangan yang perlu dianalisis secara regular. Alokasi pendanaan yang diatur dalam nomenklatur seharusnya mengikuti analisis kajian risiko dalam situasi pra bencana, hendaknya bersifat fleksibel untuk digunakan dalam pemulihan rehab rekon serta dapat disesuaikan alokasinya ketika daerah menghadapi dampak yang lebih besar dari kajian risiko yang ditetapkan sebelumnya.

e. Sinkronisasi antar document Perencanaan Pembangunan
Peraturan Presiden no 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020 – 2024 memberikan semangat baru bahwa segala proses perencanaan pembangunan baik nasional dan daerah perlu merujuk RIPB yang disertai dengan monitoring dan evaluasinya. Dengan demikian hendaknya diatur secara tegas bahwa sinkronisasi penyelenggaraan PB dilakukan dari mulai kajian risiko, perencanaan, penyusunan rencana strategis, sampai pada penetapan rencana aksi PB untuk kemudian dituangkan dalam document perencanaan pembangunan baik 5 tahunan dan 1 tahunan.

2. **Partisipasi dan relasi organisasi masyarakat sipil, dunia pendidikan, lembaga usaha, media masa dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PB**
Telah ada forum-forum pengurangan risiko bencana di daerah yang berisi para pihak dalam mandat PB. Forum menjadi platform yang menjadi rujukan dan penyeimbang bagi daerah untuk berpikir kritis dalam penyelenggaraan PB. Oleh karena itu keberadaan forum PRB hendaknya diperkuat dengan adanya regulasi, pendanaan, fungsi dan peran agar dapat berkontribusi dalam membangun ketangguhan di daerah.

3. **Prinsip inklusif yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan PB**
Kelompok rentan seringkali dimaknai hanya sebagai kelompok yang wajib mendapat pertolongan ketika terjadi bencana. Namun kapasitas yang dimiliki kelompok rentan sering diabaikan dan tidak diperhitungkan dalam kontribusi penyelenggaraan PB. Pengesahan Peraturan Presiden no 42 tahun 2020 menjadi kekuatan terutama pada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam PB baik pra, saat dan pasca bencana. Slogan “nothing about us without us” akan menjadi landasan perubahan paradigma bahwa pendekatan PB belum komprehensif jika belum inklusif. Hal ini hendaknya perlu diatur secara jelas dalam regulasi bahwa penyelenggaraan PB wajib memberikan ruang bagi difabel, lansia, anak, perempuan, dan kelompok yang tereksklusi lainnya untuk berpartisipasi secara bermakna.

IDEA juga menerbitkan buku panduan Panduan kebijakan desa dalam Penanggulangan Bencana covid 19 dan panduan perencanaan penganggaran desa dalam situasi bencana Covid 19.
IDEA juga tergabung dalam Jejaring Mitra Kemanusiaan (JMK) untuk respon pemulihan tanggap darurat di Palu, Sigi dan Donggala Sulawesi Tengah. Anggota JMK terdiri dari 16 organisasi di seluruh Indonesia yang memiliki konsen dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.



BAGIAN 8

Pengembangan Isu dan Jaringan

Hingga tahun 2020, IDEA terlibat dalam berbagai kelompok atau jaringan advokasi di Indonesia. Baik di isu pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengurangan risiko bencana hingga tata kelola industri ekstraktif. Berikut adalah jejaring advokasi idea yang aktif hingga saat ini.

1. Jaringan Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan DIY
Mengawal isu pendidikan di DIY

2. Dana keistimewaan DIY
Mengawal jejaring CSO advokasi dan monitoring dana keistimewaan DIY dan jejaring antikorupsi.

3. Jaringan advokasi kesehatan DIY
Mengawal isu advokasi keadilaan akses layanan BPJS kesehatan bagi kelompok rentan.

4. Jaringan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) DIY
Memantau isu-isu kebencanaan di DIY: respon bencana tanah longsor di Wonolelo Bantul, respon tanggap darurat Covid Covid 19 dengan support sembako dan masker.

5. Jaringan Koalisi perbaikan tata kelola industri ekstraktif PWYP Indonesia
Terlibat sebagai board 2016-2020, Wakil EITI 2016-2020. Memberikan masukan terkait konten isu dan manajemen kelembagaan.

6. Jaringan Nasional Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3)
Koordinator pengelolaan aduan, rekrutmen ORI, advokasi audit BPJS Kesehatan.

7. Jaringan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP)
Mengawal isu tata kelola anggaran pendidikan, moderator diskusi nasional.

8. Jaringan Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)
Advokasi implementeasi KIP, monitoring kinerja komisi informasi pusat dan daerah, tim seleksi komisi Informasi DIY periode 2020 -2024, tim monev Anugerah Keterbukaan Informasi Publik DIY, masuk Kelompok Kerja Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.

9. Jaringan DESA
Terlibat dalam diskusi keherbashila dan tantangan implementasi UU Desa.

10. Jaringan SDG's
Terlibat mengawal goals 16 dan penyusunan laporan SDGs DIY.

11. Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY)
Mengawal isu gender dan kelompok minoritas

12. Jaringan OGP nasional dan Global

13. Jaringan nasional Transparansi akuntabilitas anggaran Covid 19
Menjadi pemantik diskusi tata kelola anggaran Covid 19 dalam forum workshop an webinar.

14. **Transparansi pengadaan barang dan jasa**

15. Jaringan advokasi Transfer Fiscal Berbasis Ekologi (TAKE TAPE)
Training kebijakan fiskal berbasis ekologi, workshop advokasi TAKE TAPE.

16. Jaringan advokasi RUU Energi baru Terbarukan (EBT)



BAGIAN 9

Memperkuat kapasitas internal untuk Mobilisasi Sumberdaya

A. Pengembangan Knowledge Management

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat dan publik dibanjiri informasi dari berbagai sisi dan berbagai bentuk. Situasi ini belum didukung oleh masyarakat dimana belum memiliki daya kritis yang baik dalam menerima informasi publik. Banjir informasi tidak mendorong masyarakat untuk merespon dengan memperbanyak literasi yang baik, namun justru menyebabkan problem baru seperti konflik sosial, penyebaran kabar bohong, dan sebagainya.

Dalam situasi demikian, pengelolaan pengetahuan IDEA harus mampu mengambil peluang yang lebih strategis untuk menangkap perkembangan teknologi dan inovasi serta mengembangkan kapasitas untuk menuliskan pengalaman yang lebih reflektif dengan kualitas tulisan yang baik. Wacana dan praktek yang sudah dilakukan selama hampir 20 tahun harus dikelola dengan baik, dengan dukungan pengelolaan knowledge management harus kuat untuk membingkai kerangka yang ada.

Dalam definisi umum. pengelolaan pengetahuan adalah upaya yang sadar dan sengaja untuk mengelola informasi dan pengetahuan sebagai aset lembaga, menjaga keberlanjutan keberadaan pengetahuan itu dalam lembaga, termasuk didalamnya upaya mengembangkan dan menangkap pengetahuan, pembelajaran dan pengalihan pengetahuan, serta pemanfaatan pengetahuan.

Knowledge management memiliki misi "Meningkatkan Pengelolaan Pengetahuan sebagai Penyedia Informasi dan Produk Pengetahuan untuk Pengembangan Program dan Advokasi yang lebih luas dengan Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi". Isu strategis ini diturunkan ke dalam 3 sub-bidang: pertama, sub-bidang riset dan data; kedua, sub-bidang publikasi dan informasi; dan ketiga, pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan.

1. Riset Dan Data

Aktivitas literature research dilakukan pada dua topik yaitu Perhutanan Sosial dan Adaptasi Perubahan Iklim. Pengumpulan artikel, , tulisan, buku, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan kedua tema tersebut sudah berjalan namun belum melakukan riset secara lebih mendalam. Selain itu, rencana untuk melakukan penelitian pendahuluan tentang konservasi air dan hutan, dalam bentuk studi lapangan, atas sejumlah wilayah yang melakukan konservasi tersebut, seperti hutan Mangrove di Kulon Progo, hutan di Kalibiru Kulon Progo, dan koservasi air di Umbul Ponggok Klaten, belum berjalan..

2. Publikasi dan Informasi

Pada tahun 2020, Bidang Publikasi dan Informasi, sudah mempublikasikan kerja-kerja IDEA di seluruh media sosial yang ada. Beberapa konten yang dipublikasikan di saluran/media IDEA antara lain:

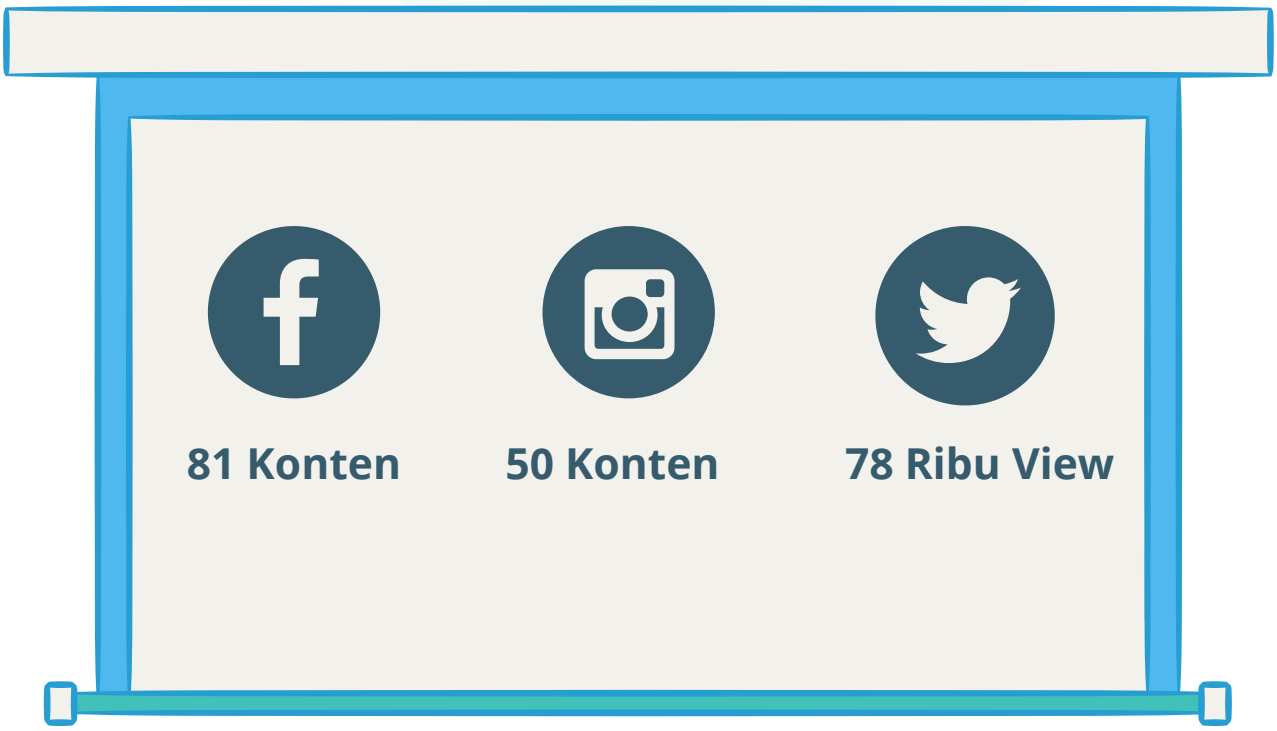
- Kegiatan-kegiatan dalam program yang dijalankan IDEA
- Profil program yang pernah dijalankan IDEA
- Kegiatan-kegiatan yang melibatkan pegiat IDEA.
- Flyer kampanye penanganan dan pencegahan covid-19
- Lowongan kerja/Recruitmen pegiat IDEA
- Video Animasi tentang pengertian dan langkah-langkah advokasi kebijakan.
- Live Streaming diskusi publik dan konferensi pers program.
- Modul training dan panduan advokasi anggaran, panduan audit sosial, panduan penyusunan perencanaan dan penganggaran di era pandemi, dan sebagainya.



Statistik Publikasi di Media Sosial IDEA

Media sosial idea tahun 2020 mempublikasi sebanyak

- Video Animasi tentang pengertian dan langkah-langkah advokasi kebijakan.
- Live Streaming diskusi publik dan konferensi pers program.
- Modul training dan panduan advokasi anggaran, panduan audit sosial, panduan penyusunan perencanaan dan penganggaran di era pandemi, dan sebagainya.



Pengelolaan Website IDEA

Selain Facebook, Twitter dan Instagram, website masih menjadi pilihan dalam mempublikasi kerja-kerja lembaga. Produk yang dipublikasikan lewat website ialah berupa artikel dan straight news. Selain itu, website IDEA juga digunakan untuk mempublikasikan audit laporan keuangan IDEA. Selama tahun 2020, Bidang Publikasi dan Informasi KM mempublikasi 21 konten di website IDEA dengan pengunjung lebih dari 5000 orang dalam waktu satu tahun.

Konten tersebut antara lain berupa berita kegiatan, profil program, success story program, policy brief, siaran pers, lowongan/recruitmen staff, hingga laporan keuangan IDEA beserta auditnya.
Berikut adalah judul dan link publikasi di website IDEA selama periode tahun 2020.

No	Judul	Link
1	IDEA Gelar Koordinasi dengan Jurnalis dan CSO, Bahas Tata Kelola Air Bersih Di Kabupaten Bantul	http://perkumpulanidea.or.id/idea-gelar-koordinasi-dengan-jurnalis-dan-cso-bahas-tata-kelola-air-bersih-di-kabupaten-bantul/
2	Hasil Audit Keuangan IDEA Tahun 2017 - 2018	http://perkumpulanidea.or.id/hasil-audit-keuangan-idea-tahun-2017-2018/
3	Equals Digital Skills Fund, Pengetahuan Digital untuk Mengadvokasi Dana Desa	http://perkumpulanidea.or.id/equals-digital-skills-fund-pengetahuan-digital-untuk-mengadvokasi-dana/
4	Siaran Pers: Gubernur DIY Harus Transparan Berikan Informasi Penanganan Virus Corona	http://perkumpulanidea.or.id/gubernur-diy-harus-transparan-berikan-informasi-penanganan-virus-corona-2/
5	Monitoring Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah DIY	http://perkumpulanidea.or.id/monitoring-pengadaan-barang-jasa-di-pemerintah-diy/
6	Kampanye dan Advokasi Anti Politik Uang untuk Pemilu Bersih	http://perkumpulanidea.or.id/kampanye-dan-advokasi-anti-politik-uang-untuk-pemilu-bersih/
7	Riset Keterbukaan Kontrak untuk Pengelolaan Air Bersih	http://perkumpulanidea.or.id/riset-keterbukaan-kontrak-untuk-pengelolaan-air-bersih/
8	Siaran Pers: Launching Posko Aduan Bansos dan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19	http://perkumpulanidea.or.id/launching-posko-aduan-bansos-dan-pengadaan-alat-kesehatan-covid-19/
9	Lowongan Budget Advocacy Officer dan Field Officer	http://perkumpulanidea.or.id/lowongan-budget-advocacy-officer-dan-field-officer/

10	Siaran Pers: Sengkarut Penyaluran Bansos Covid-19 di DIY	http://perkumpulanidea.or.id/siaran-pers-sengkarut-penyaluran-bansos-covid-19-di-diy/
11	Diskusi Terarah Bahas Kontrak Terbuka Sektor Air di Kabupaten Bantul	http://perkumpulanidea.or.id/diskusi-terarah-bahas-kontrak-terbuka-sektor-air-di-kabupaten-bantul/
12	Policy Brief: Pelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Siklus Tata Kelola Air Bersih di Kabupaten Bantul	http://perkumpulanidea.or.id/policy-brief-pelembagaan-monitoring-dan-evaluasi-dalam-siklus-tata-kelola-air-bersih-di-kabupaten-bantul/
13	Policy Brief: Membangun Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Air Bersih di Kabupaten Bantul	http://perkumpulanidea.or.id/4533-2/
14	Lowongan Admin Officer	http://perkumpulanidea.or.id/lowongan-admin-officer/
15	Lowongan Konsultan Penyusun Modul dan Fasilitator	http://perkumpulanidea.or.id/lowongan-konsultan-penyusun-modul-dan-fasilitator/
16	Siaran Pers: Sengkarut Pendataan dan Penyaluran Bansos DIY (2)	http://perkumpulanidea.or.id/siaran-pers-sengkarut-pendataan-dan-penyaluran-bansos-diy-2/
17	IDEA Dorong Pelaksanaan PUG Desa di Kabupaten Sleman dan Gunungkidul	http://perkumpulanidea.or.id/idea-dorong-pelaksanaan-pug-desa-di-kabupaten-sleman-dan-gunungkidul/
18	Kreatifitas di Tengah Pandemi	http://perkumpulanidea.or.id/kreatifitas-di-tengah-pandemi/
19	Harapan Air Bersih untuk Semua	http://perkumpulanidea.or.id/harapan-air-bersih-untuk-semua/
20	Perubahan Kecil untuk Tata Kelola Air yang Lebih Baik	http://perkumpulanidea.or.id/perubahan-kecil-untuk-tata-kelola-air-yang-lebih-baik/
21	Lowongan Finance Officer	http://perkumpulanidea.or.id/lowongan-finance-officer/

IDEA di Media Massa

Dalam beberapa isu, IDEA kerapkali menjadi rujukan media massa sebagai narasumber pemberitaan, teruma pada isu advokasi anggaran publik. Berikut sebagian pemberitaan yang menjadikan IDEA sebagai rujukan

No	Judul	Media	Link
1	Kisah Kolaborasi Masyarakat Sipil dan Jurnalis di Yogyakarta dalam Monitoring PBJ	antikorupsi.org	https://www.antikorupsi.org/id/article/kisah-kolaborasi-jurnalis-dan-masyarakat-sipil-di-yogyakarta
2	Menelisik Dugaan Penyimpangan Menggunakan Open Tender	opentender.net	https://www.opentender.net/monitoring-report/2
3	EKS BIOSKOP INDRA: Dokumen Lelang Ditutup Rapat	Harian Jogja	https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/11/22/510/1025356/eks-bioskop-indra-dokumen-lelang-ditutup-rapat
4	EKS BIOSKOP INDRA: Catatan Merah Lelang Proyek Pusat PKL Malioboro	Harian Jogja	https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/11/20/510/1025167/eks-bioskop-indra-catatan-merah-lelang-proyek-pusat-pkl-malioboro
5	Bau Tak Sedap Lelang Cepat di Sebelah Istana (1)	Harian Kompas	https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/20/sengkarut-relokasi-pkl-malioboro-1-bau-tak-sedap-lelang-cepat-di-sebelah-istana/
6	Sentra PKL Malioboro: Dibayangi Monopoli, Ditutupi ke Publik	Gatra,com	https://www.gatra.com/news-457874-hukum-sentra-pkl-malioboro-dibayangi-monopoli-ditutupi-ke-publik.html

c. Kelembagaan dan Organisasi

Perkumpulan IDEA dikelola dengan managemen yang profesional dengan melibatkan pegiat yang memiliki kapasitas memadai untuk menjalankan rencana-rencana strategis organisasi untuk pencapaian visi misi organisasi.

Struktur organisasi IDEA terdiri atas divisi knowledge management, divisi keuangan, divisi operasional, divisi program, dan divisi pengembangan fundrising. Dalam periode Tahun 2020 pegiat IDEA berjumlah 16 orang terdiri atas 11 orang perempuan dan 5 orang laki-laki dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Personal	2020	L	P
Dewan Pengurus	3 orang	1	2
Tim Keuangan	3 orang	0	3
Tim operasional	2 orang	2	0
Tim program dan knowledge management	5 orang	2	3
Analitika Indonesia	1 orang	0	3
Total	14	5	11

BAGIAN 10

LAPORAN POSISI KEUANGAN TAHUN 2020

A. Dana Program yang dikelola IDEA

Dalam kurun waktu tahun 2020, IDEA mengelola program dengan total anggaran mencapai kurang lebih Rp. 3,7 Milyar. Trend ini naik dibandingkan tahun 2019, dimana tahun 2019 mengelola dana program sebesar Rp.2,7 Milyar.

Sumber dana program masih didominasi donor, namun IDEA juga mengelola program dana hibah yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia untuk program Pengarusutamaan Gender. Prinsip-prinsip pengelolaan dana program tetap mengacu kepada Prosedur Operasi Baku Sistem Keuangan IDEA yang menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas

PENUTUP

Atas capaian-capaian kinerja program dan keuangan selama Tahun 2019, segenap organ organisasi IDEA menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung program IDEA.

Tantangan gerakan organisasi masyarakat sipil kedepan semakin banyak, terutama aspek perkembangan tehnologi informasi agar menjadi bagian dalam memastikan transformasi perubahan sosial yang lebih substantif, adil dan setara.

Oleh karena itu, IDEA sangat berharap dukungan-dukungan penuh dapat terjadi secara konsisten baik dukungan sumberdaya dari internal dan eksternal maupun dukungan dalam kerja-kerka kolaborasi maupun engagement antar pemangku kepentingan sehingga visi misi organisasi dpaat tercapai dan perubahan sosial secara umum dapat terwujud.


idea
Ide dan Analitika Indonesia